

SAMBUTAN

Pontjo Sutowo

DISKUSI PUBLIK

KEMBALI KE FITRAH CITA NEGARA

“
**Demokrasi Digital:
Antara
Partisipasi
dan
Represi**



Jumat, 15 Agustus 2025

Pontjo Sutowo KETUA ALIANSI KEBANGSAAN

Assalamualaikum w.w.,
Salam Sejahtera,
Shalom,
Oom swastiatu,
Namo Budaya

Kepada yang sangat saya hormati,

Bapak Wijayanto

(Direktur Media dan Demokrasi LP3ES dan Wakil Rektor Universitas Diponegoro Semarang)

Ibu Rustika Herlambang

(Direktur Komunikasi PT Indonesia Indicator)

Bapak Lukas Luwarso

(Jurnalis Senior dan mantan Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen)

selaku narasumber dalam acara FGD kali ini, serta
Kepada yang saya muliakan

Sdri. Nofia Fitri

(Sekretaris Program Aliansi Kebangsaan)
selaku Moderator,

Serta seluruh peserta diskusi yang saya muliakan.

Alhamdulillah. Puji syukur senantiasa kita limpahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, *Allah Subhaanahu Wata'aalaa*. Atas perkenan TUHAN, pada hari ini, kita semua diberi kesehatan dan kesempatan, untuk kembali mendiskusikan isu krusial kenegaraan dan kebangsaan kita dalam sebuah **Focused Group Discussion** Aliansi Kebangsaan.

Pada siang-sore hari ini kita akan mengambil fokus pada ranah tata kelola dengan topik **"Demokrasi Digital: Antara Partisipasi dan Represi"**.

Sebagai informasi awal untuk Bapak/Ibu sekalian yang baru bergabung dalam diskusi jejaring cendekiawan Aliansi Kebangsaan, **Diskusi Serial Kebangsaan** semacam ini, dalam ranah tata nilai, tata kelola, dan tata sejahtera telah dilaksanakan oleh Aliansi Kebangsaan bersama para mitra Aliansi Kebangsaan sejak Maret 2019, enam tahun yang lalu. Hasil rumusan dalam diskusi-diskusi tersebut kemudian menjadi bahan utama dalam penyusunan buku berjudul “Memperadabkan Bangsa: Paradigma Pancasila Untuk Membangun Indonesia”. Buku dimaksud sudah diterbitkan oleh Penerbit KOMPASS (2022) dan sudah tersebar luas di ruang publik dan barangkali juga di ruang-ruang baca Bapak/Ibu sekalian.

Lalu untuk menindaklanjuti gagasan-gagasan besar yang mengemuka dari pandangan para pakar dalam diskusi-diskusi tersebut, Aliansi Kebangsaan kemudian menginisiasi gerakan bersama untuk Kembali Ke Fitrah Cita Negara, melalui dua kegiatan utama sejauh ini, yaitu **Urun Rembuk Kebangsaan** yang sudah dilaksanakan dalam beberapa putaran sejak Maret 2024 dan **FGD** seperti yang kita laksanakan siang-sore ini.

Selain dua program yang memberikan kanal bagi para pakar untuk mencurahkan partisipasi bermakna (*meaningful participation*) dalam pembangunan bangsa dan negara kita, Aliansi Kebangsaan juga memiliki dua agenda programatik lainnya, yaitu **Podcast Tiga Ranah Pancasila** sebagai saluran utama kampanye digital (digital campaign) untuk menjangkau khalayak yang lebih luas, utamanya generasi muda, dan **Dana Darma Pancasila (DDP)** yang secara terbuka menghimpun partisipasi publik untuk menyemai gagasan-gagasan penguatan dan implementasi Pancasila sebagai Titik Temu, Titik Tumpu, dan Titik Tuju kita sebagai negara-bangsa, terutama di perguruan tinggi. DDP dilembagakan dalam bentuk yayasan, yang kami maksudkan sebagai *crowd funding*, penghimpunan pendanaan publik, untuk gerakan memperadabkan bangsa melalui Pancasila.

Program yang saat ini sudah jalan beberapa gelombang adalah hibah penelitian bagi mahasiswa program pascasarjana. Pemberian bantuan atau dana hibah penelitian untuk mahasiswa S2 dan S3 ini bertujuan untuk memperkuat epistemologi Pancasila pada tiga ranah, yaitu Ranah Mental-Kultural atau Tata Nilai, Ranah Institusional-Politik atau Ranah Tata Kelola, dan Ranah Material-Teknologikal atau Ranah Tata Sejahtera.

Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati,

Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, topik diskusi ranah tata kelola kali ini mengambil tajuk “Demokrasi Digital: Antara Partisipasi dan Represi”. Topik ini kami angkat sebagai isu sentral, didasarkan pada konsiderasi dasar bahwa saat ini perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial.

Demokrasi, yang dahulu hanya berlangsung di ruang-ruang *offline*, melalui perjumpaan di luar jaringan internet (luring), kini menemukan bentuk baru demokrasi dalam ruang digital. Warganet memanfaatkan media sosial, platform diskusi, dan kanal berita daring untuk menyuarakan pendapat, mengawasi pemerintah, hingga melakukan mobilisasi sosial secara masif dan cepat, yang kita kenal dengan demokrasi digital. Melalui ruang digital, terjadi perluasan partisipasi politik dan kewargaan.

Demokrasi digital menggambarkan bagaimana teknologi digital dimanfaatkan untuk mendukung proses demokratis, seperti transparansi pemerintahan, akuntabilitas, dan partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan publik. Proses-proses partisipasi publik yang biasa disebut *internet citizen (netizen)* atau warga internet (warganet) pada umumnya untuk beberapa tujuan, seperti kampanye politik di media sosial, petisi daring dan *crowd-sourcing* kebijakan, aksi digital (*digital activism*), forum diskusi online sebagai bentuk deliberasi publik, dan sebagainya.

Teknologi digital mempercepat arus informasi dan memungkinkan siapa pun untuk bersuara. Hal ini menjadi peluang besar untuk memperluas cakupan demokrasi, khususnya bagi kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan dan tidak punya saluran untuk berpendapat. Mereka yang sebelumnya tidak dapat bersuara (*voiceless*), menjadi lebih mungkin untuk didengar.

Perkembangan digital dapat memperkuat keterlibatan warga negara dalam proses politik dengan menyediakan saluran komunikasi dua arah, antara publik dan pembuat kebijakan. Dalam konteks Indonesia, keberadaan media sosial seperti Twitter, Instagram, dan TikTok telah memainkan peran penting dalam gerakan sosial. Berkibarnya berbagai tagar seperti #ReformasiDikorupsi, #KaburAjaDulu hingga #IndonesiaGelap merupakan bentuk-bentuk partisipasi publik yang semakin terbuka dan terfasilitasi oleh kemajuan digital.

Fenomena tersebut merupakan konteks baru dari sisi saluran atau media yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi (*technological advance*). Sementara itu, ada konteks lain dari sisi substansi kelembagaan representasi dan konstituensi rakyat, terutama melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dinamika politik di lembaga-lembaga perwakilan kita, di partai-partai politik, dan kelembagaan politik demokratik kita hari ini semakin monolitik. Elite politik memiliki narasinya sendiri yang cenderung tunggal di tengah aspirasi publik di berbagai bidang. Parlemen sering gagal menjadi saluran rakyat. Ia sering hadir sebagai saluran sekelompok kecil elite politik dan ekonomi yang disebut oligarki itu. Konteks tersebut mendorong lahirnya dinamika politik baru yang melampaui dinamika politik di parlemen yang sering jumud dan tidak memantulkan aspirasi publik. Politik pascaparlemen, *post parliamentary politics*, kemudian mendapatkan lokus baru di tengah perkembangan digital itu. Disitulah sebenarnya *digital democracy* memiliki tautan yang solid dengan *post parliamentary politics*.

Bapak/Ibu sekalian yang saya banggakan...

Namun demikian, belakangan kita melihat adanya respons yang tidak tepat atas fenomena demokrasi digital dan *post parliamentary polics* di kita. Terhadap penguatan ruang-ruang partisipasi digital ini, kita melihat ada kebijakan dan tindakan untuk melakukan kontrol dan pembatasan oleh negara atau kekuatan dominan terhadap partisipasi publik di dunia maya. Akibatnya, terjadi tensi atau ketegangan antara partisipasi melalui ruang demokrasi digital dengan upaya upaya untuk melakukan kontrol dan restriksi melalui represi digital.

Gesekan antara demokrasi digital dan represi digital mencerminkan dinamika antara kontrol negara dan kebebasan sipil. Pemerintah kerap berdalih bahwa pembatasan digital diperlukan untuk menjaga ketertiban umum, mencegah hoaks, atau menangkal radikalisme. Namun, pembatasan ini sering kali tidak proporsional dan kurang akuntabel. Padahal, demokrasi digital hanya dapat tumbuh jika terdapat ruang deliberatif yang bebas dari kontrol represif. Tanpa jaminan hak digital, ruang partisipasi justru akan menjadi tempat intimidasi dan sensor, bukan arena demokratis. Ketegangan ini semakin kompleks dengan adanya teknologi baru seperti pengenalan wajah, algoritma penyaring konten, dan kecerdasan buatan (AI) yang dapat digunakan untuk meningkatkan kontrol negara atas informasi digital.

Di negara kita, represi digital mudah kita temukan dalam ruang-ruang demokrasi kontemporer, mulai dari *hacking* dan *doxing* para aktivis, pembungkaman kritik di dunia maya, kriminalisasi menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), hingga pemadaman jaringan internet. Para narasumber pasti akan mengelaborasi secara lebih detil dan tajam mengenai fenomena represi digital ini,

Bapak/Ibu Sekalian yang Terhormat...

Selamat berdiskusi. Selamat menyimak secara cermat dan saksama pandangan para pakar yang dihadirkan oleh Aliansi Kebangsaan untuk mendiskusikan topik kontemporer dan krusial ini. Forum ini diharapkan dapat menghasilkan pemikiran, pengetahuan, dan insight baru sebagai sumbangsih bersama kita untuk menawarkan solusi-solusi bagi penyelesaian masalah kebangsaan dan kenegaraan kita.

Mudah-mudahan upaya kita ini akan berkontribusi nyata bagi pelaksanaan visi negara-bangsa kita untuk merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan Makmur. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan atas perhatian Bapak/Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih.

*Salam sejahtera untuk kita semua.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Jakarta, 15 Agustus 2025
Ketua Aliansi Kebangsaan,



Pontjo Sutowo